

Eksistensi Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama

Ishak¹, Sulaiman W.^{2*}

¹Pendidik Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT) & SMK Negeri 1 Bendahara Aceh Tamiang.

²Pendidikan Agama Islam, STAI-AT & IAIN Langsa, Indonesia.

Email: dr.sulaiman.w.ma@gmail.com^{2*}

Abstrak

Pendidikan NU merupakan sejarah panjang yang mengikuti perjalanan bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan keberadaan NU hingga saat ini selalu ditopang oleh pesantren. Oleh karena itu, Pesantren adalah basis kekuatan NU yang melahirkan para ulama dan kiai, kemudian membentuk jamâiyah NU dan berjuang di dalamnya. Pada zaman penjajah, pesantren bersikap non kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Akibat dari sikap tersebut, maka pemerintah kolonial ketika itu mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal itu dikarenakan eksistensi pendidikan NU memiliki dua ciri keunggulan; (1) *Aliyâh itimad alannafsi* (berdikari), (2) *Fil Ijtimaiyah* (memasyarakat) yang berarti dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Kata Kunci: *Eksistensi, Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama.*

Abstract

NU education is a long history that follows the journey of the Indonesian nation. In the context of education, the existence of NU has always been supported by pesantren. Therefore, Islamic boarding schools are NU's power base that gave birth to ulama and kiai, then formed the NU jamâiyah and fought in it. During the colonial era, uncooperative Islamic boarding schools confronted obstacles. As a result of this attitude, the colonial government when carrying out strict control and supervision of pesantren. After Indonesia's independence, Islamic boarding schools grew and developed rapidly, this is because the existence of NU education has two characteristics of excellence; (1) *Aliyâh itimad alannafsi* (self-reliant), (2) *Fil Ijtimaiyah* (community) which means from the community and for the community.

Keywords: *Existence, Nahdlatul Ulama Islamic Education*

PENDAHULUAN

Mengamati Nahdlatul Ulama yang juga dikenal dengan NU dalam konteks pendidikan merupakan hal yang menarik. Hal ini dikarenakan bahwa NU menaungi beragam jenis pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kuantitas pendidikan di bawah naungan NU (Ma'arif) tidak terbantahkan banyaknya. Meski demikian, dalam hal kualitas, keberadaan pendidikan di bawah naungan NU tetap harus diperjuangkan untuk ditingkatkan. Tentu banyaknya lembaga pendidikan di bawah naungan NU berbanding lurus dengan jumlah umat NU yang mayoritas di negeri ini. Hal itu yang kemudian menuntut disediakannya lembaga-lembaga pendidikan yang dapat dijadikan media belajar dan pengembangan bagi umat NU. NU perlu mengkoordinasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungannya, mengingat ada ciri khusus yang harus ada dalam materi pelajaran di lembaga pendidikan NU, yaitu materi Aswaja (*Ahlus Sunnah wal-Jama'ah*). Materi ini tidak musti diberikan di lembaga pendidikan di luar naungan NU.

Tulisan ini akan mengulas eksistensi pendidikan NU mulai dari sejak berdirinya sampai dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta beragam problem yang melingkupi dan kemungkinan solusinya. Bagaimanapun tulisan ini hanya secercah kata untuk melukiskan keberadaan pendidikan NU secara sekilas. Untuk melihat dan mengenal serta memahami pendidikan NU yang sebenarnya haruslah melalui observasi

dan kajian serta eksplorasi yang lebih mendalam melalui beragam metode dan sumber yang tersedia.

Dalam perjalanannya, pendidikan NU memang tidak steril dari beragam masalah. Salah satu masalah yang masih melekat adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) para pendidikannya. Oleh karenanya, peningkatan kualitas SDM melalui beragam cara dan metode masih terus diupayakan, misalnya, pelatihan, rekomendasi sekolah, dan sejenisnya, perlu dilakukan oleh NU dan berbagai lembaga yang ada di bawah naungan NU.

METODE

Metode yang dipakai untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan ulasan pustaka (*Librari Research*). “Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kajian-kajian perspektif” (W., 2022). Kemudian kajian content analysis ini diambil dari dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku maupun kajian-kajian jurnal yang berhubungan dengan pembahasan (Ainun Mardhiah & Sulaiman W., 2022). Sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tentang “Eksistensi Pendidikan Islam Nahdhatul Ulama” sebagai pokok bahasan, peneliti memanfaatkan “situs google scholar” (Zainuddin & Sulaiman W., 2022). Sedangkan pengolahan data akan dilakukan analisis dengan memakai langkah-langkah: (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) kesimpulan atau verifikasi (Zainuddin et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pendidikan Nahdlatul Ulama

Sejarah pergerakan NU sebenarnya adalah sejarah pendidikan nusantara. “Nahdlatul ulama” yang di singkat NU, artinya kebangkitan ulama; adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari’ pada tanggal 31 Januari 1926 M. bertepatan 16 Rajab 1344 H. di Surabaya. Organisasi “Nahdlatul Ulama” didirikan dengan tujuan; “Untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam, dengan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam, Alquran, As-Sunnah, Al-Ijma’ (kesepakatan ulama), dan Al-Qiyas (analogi), dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya. NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama’ah dan menggunakan jalan pendekatan madzhab” (Ratih Kusuma Ningtias, 2018). “Bidang akidah, NU mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama’ah yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-sy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan (madzhab) Imam Abu Hanifah an-Nu’man (Imam Hanafi), Imam Malik Bin Annas (Imam Maliki), Imam Muhammad Bin Idris as-Syafi’i (Imam Syafi’i), dan Imam Ahmad Bin Hanbal (Imam Hanbali). Dalam bidang Tasawwuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghozali, serta imam-imam lain” (Ratih Kusuma Ningtias, 2018).

Pohon organisasi NU sangat rimbun oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, majelis taklim, diniyyah, madrasah/sekolah dan perguruan tinggi. Dalam hal pendidikan, NU merupakan salah satu lokomotif pembaharuan pendidikan. Setahun setelah berdirinya NU persisnya pada Mukdamar NU ke-2 pada tahun 1927, Mukdamirin mengagendakan penggalangan dana secara nasional untuk mendirikan dan membangun madrasah dan sekolah (Azis DY & Aceng Abdul, 2003). Pada Mukdamar NU ke-3 tahun 1928, elite NU memprakarsai gerakan peduli pendidikan dengan mengajak para Mukdamirin untuk mengunjungi pesantren-pesantren besar seperti Tambak Beras yang dipimpin KH. Wahab Chasbullah, Denanyar yang dipimpin oleh KH. Bisri Syamsuri, dan Nganjuk yang dipimpin oleh K. Pathudin Seror Putih. Pada Mukdamar NU ke-4 tahun 1929, panitia Mukdamar merespon kecenderungan naiknya kuantitas dan kualitas pendidikan yang mendorong para Mukdamirin sepakat untuk membentuk wadah khusus yang menangani bidang pendidikan yang bernama Hoof Bestur Nahdlatul Oelama (HBNO) yang diketuai oleh Ustadz Abdullah Ubaid, waktu itu disebut presiden. Pada perkembangan selanjutnya, terbentuklah Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LPMNU) pada Mukdamar NU ke-20 tahun 1959 di Jakarta.

Dari arena Mukdamar ke Mukdamar, hingga Mukdamar NU ke-30 tahun 1999 di Kediri, Lirboyo, Jawa Timur, NU tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai mainstream (pemikiran utama). Munas dan Konbes NU tanggal 25-28 Juli 2002 di Pondok Gede Jakarta menghasilkan Taushiyah Pondok Gede Tahun 2002, yang mencoba mempertegas kembali posisi bidang pendidikan untuk menjadi prioritas program NU. Untuk menafsirkan lebih rinci, tak lama setelah itu, tepatnya tanggal 22-25 Agustus 2002 di Kawasan Puncak Batu Malang Jawa Timur, diselenggarakan Rapat Kerja LPMNU dan Musyawarah Kerja Perguruan Tinggi NU. Di

forum tersebut, NU kembali mematangkan format, strategi dan *guidlines* (garis panduan) pengembangan pendidikan di lingkungan NU.

Keberadaan pendidikan di wilayah NU berawal dari keberadaan pesantren. Para kiai pesantren, dahulu kala, ketika pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, sebagian besar mendirikan pesantren sebagai institusi pendidikan. Oleh karena pendidikan pesantren, maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan, khususnya fikih-hukum-yurisprudensi; dan karena kitab fikih itu kebanyakan berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan ilmu alat berupa nahu saraf, jadi pesantren mesti memiliki perangkat keilmuan nahu-saraf (Mastuhu, 1999).

Pada perkembangan selanjutnya, persisnya setelah kemerdekaan, terjadi pengembangan model pendidikan di pesantren. Hal ini berawal dari realitas bahwa tidak semua santri yang keluar dari pesantren itu mampu menjadi kiai, sementara mereka tetap membutuhkan ranah pendidikan, akhirnya mereka mendirikan sekolah-sekolah di kampung yang bernama madrasah. Jadi madrasah itu sebenarnya keberlanjutan dari pesantren. Di madrasah, materi keilmuan yang diajarkan pada awalnya adalah sama dengan yang ada di pesantren, bedanya kiai tidak berada dalam lingkup madrasah, tidak seperti pesantren yang memiliki ciri-ciri; ada santri, kitab kuning, kiai, pondokan, dan masjid.

Dalam konteks pendidikan NU, sistem pendidikan pesantren yang telah lama melembaga bagi masyarakat Islam nusantara tidak bisa dilupakan. Keberadaan NU hingga saat ini selalu ditopang oleh pesantren. Dari pesantren basis kekuatan NU dibangun dengan banyak melahirkan para ulama dan kiai, yang kemudian membentuk jamâiyah NU dan berjuang di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan pesantren terhambat ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pesantren bersikap non kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Akibat dari sikap tersebut, maka pemerintah kolonial ketika itu mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan pesantren yang semula hanya *rural based institution*, yang bersifat kelembagaan berbasis pedesaan kemudian berkembang menjadi pendidikan urban; karena pesantren tumbuh juga di kota-kota besar. Demi meminimalisasi problem pendidikan pesantren dibutuhkan keberanian diri untuk melakukan rekonstruksi dalam artian positif, yakni membangun pesantren berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pendidikan pesantren bukan berarti merombak seluruh sistem yang ada yang berakibat hilangnya jati diri pesantren. Rekonstruksi tersebut tidak harus merubah orientasi atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fiddinâ* dalam pengertian yang luas; juga tidak perlu mengorbankan nilai-nilai seperti keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian dan optimism (Abd Haris, 2006).

Dengan demikian keberadaan pendidikan di lingkungan NU sebelum madrasah adalah pesantren. Saat ini pendidikan pesantren berada dalam naungan NU, yang penanganannya dipasrahkan pada Lajnah RMI (Lembaga Rabithah Maâtahid Islamiyah), sedangkan pendidikan madrasah berada dalam naungan NU, yang penanganannya diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif (LPM). NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berusaha mewadahi kegiatan ulama dan umat Islam Indonesia yang berfaham aswaja untuk melanjutkan dakwah Islamiyah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Sebagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah melalui kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam menurut faham aswaja. Seperti dipaparkan di bagian depan, bahwa sebagai perangkat yang bertanggung jawab menangani pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran adalah LP Ma'arif. LP Ma'arif yang memiliki peran sangat strategis, secara resmi baru berdiri tanggal 21 Syaban 1380 H. bertepatan dengan tanggal 7 februari 1961. Tugas utama LP Ma'arif adalah membina, mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dari tingkat pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi, serta pendidikan non formal, seperti kursus-kursus dan pelatihan keterampilan.

Pada era 70-80-an, pesantren mengikuti kurikulum pemerintah. Terdapat pergeseran cukup esensial, kalau dulu orang mondok sambil sekolah, tapi sekarang karena di dalam pesantren ada kurikulum pendidikan pemerintah, maka orang sekolah sambil mondok. Jadi mondok sekarang bukan menjadi sesuatu yang mayor tetapi minor. Itulah yang menyebabkan perubahan fenomena kehidupan (khususnya pendidikan) yang terjadi di lingkungan NU. Pendidikan NU mempunyai dua ciri yang esensial; 1. *Aliyâh itimad alannafsi* (berdikari), 2.

Fil Ijtimaiah (memasyarakat), artinya dihidupi oleh masyarakat.

Semua kegiatan di pondok pesantren dikelola langsung oleh kiai atau yayasan yang sengaja dibentuk untuk itu. Posisi LP Ma'arif terhadap madrasah dan sekolah yang ada di pondok pesantren hanya sebatas koordinasi, bukan komando. Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut hal-hal yang tidak prinsip, misalnya ajakan ikut serta mensukseskan pekan olah raga dan seni (Porseni), bukan dalam soal proses belajar mengajar. Kewenangan LP Ma'arif pada lembaga kependidikan di pondok pesantren tidak berfungsi sepenuhnya, bukan terjadi secara kebetulan, tetapi berlatar belakang sosial kultural yang ada di masyarakat Nahdatul Ulama.

Bruinessen menyatakan bahwa NU merupakan organisasi yang sangat terdesentralisasi. Mengingat warganya suka memiliki rasa kemandirian (kebebasan) yang sangat tinggi yang diwarisi dari para kiai, yang lepas dari struktur organisasi, tetapi di sisi lain memiliki pengaruh dan menjadi penyangga moral NU. Dengan berdasar pada pengaruh yang dimiliki, para kiai sering merasa dapat ikut mengatur jalannya organisasi, bahkan kadang-kadang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan lain, termasuk aturan main yang telah disepakati bersama (Bruinessen & Martin van, 1994).

Masyarakat yang berkultur NU, baik dalam bentuk organisasi (*jamâiyah*) maupun kelompok paguyubannya terdapat semacam pembagian kelas, yaitu kelas kiai (ulama) yang berperan sebagai guru dan pendapatnya hampir tidak terbantahkan dengan kelas pengikut. Hubungan antara pengikut dan pimpinan jamaah (kiai) memiliki nama baik yang tinggi, dalam pengertian posisi kiai sebagai penentu dan pengikut sebagai yang ditentukan. Para fungsionaris LP Ma'arif baik di tingkat pusat maupun daerah kebanyakan terdiri dari kelas pengikut. Wajar apabila kemudian banyak kasus tentang kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran dikendalikan tidak hanya oleh Ma'arif, tetapi juga dipengaruhi oleh individu ulama atau kiai. Pengaruh kiai kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan Ma'arif. Dengan demikian wajar apabila sekolah/madrasah di lingkungan NU terkesan seperti dipimpin oleh empat (4) institusi secara bersamaan, yaitu (1) Ma'arif sebagai mandataris jamâiyah NU yang diberi wewenang di bidang pendidikan dan pengajaran, (2) Syuriah yang merupakan kelompok ulama yang merasa memiliki akses untuk mencampuri semua urusan yang menyangkut warga NU, (3) Tanfidziyah yang berperan sebagai pelaksana harian syuriah, dan (4) Ulama sebagai individu, karena merasa sebagai panutan umat (Imam Chuseno, 2003).

Dalam konteks sejarah Indonesia, gerakan ilmiah Islam (pendidikan Islam) banyak diwarnai oleh politik halus kolonial Belanda yang telah berhasil menyudutkan kaum Muslimin ke suatu sudut pandang yang hanya menekankan pada kehidupan ukhrawi. Akibatnya, dinamisasi keilmuan hanya berkisar pada *ulumussyari'ah*, tasawuf, ritual formal ubudiyah dan terpaku ke masa lampau dengan karya ilmuwan yang dinilai sakral (bebas kritik). Sementara di bidang lainnya, mengalami kemandekan dengan latar belakang anggapan bahwa ilmu umum itu semata-mata urusan duniawi. Dari sinilah muncul dikotomi *ulumuddin* (ilmu-ilmu agama) dan *ulumuddunya* (ilmu-ilmu dunia), antara madrasah dan sekolah, bahkan antara kitab dan buku. Namun sejatinya ajaran Islam yang dibawa ulama-ulama besar Indonesia tidak demikian halnya. Buya Hamka misalnya selalu mengumandangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat (W, 2022a). Sebagaimana firman Allah SWT. "*Carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan*". (Q.S. Al-Qasas: 77).

Kurikulum Pendidikan NU

Pokok pembicaraan kurikulum tidak terlepas pada tiga dimensi pokok; (1) kurikulum sebagai substansi (pengalaman belajar), (2) kurikulum sebagai sistem, (perencanaan program pembelajaran) dan (3) kurikulum sebagai mata pelajaran (bidang studi) (W, 2022b). Oleh karena itu, dari awal NU sudah merencanakan bagaimana sistem melaksanakan kurikulum dalam pendidikan. Setelah pemerintahan orde baru muncul dengan program-programnya, dalam rangka merespon modernisasi, maka madrasah-madrasah yang awalnya hanya mengajarkan materi agama sebagaimana di Pesantren berkembang dengan materi keilmuan umum. Kurikulum madrasah kemudian mengikuti kurikulum pemerintah, bukan merupakan pendidikan agama murni. Di madrasah terdapat keilmuan umum, seperti bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, kewarganegaraan,

dan lain sebagainya. Begitulah awal tumbuh-kembangnya madrasah dan sekarang berkembang sebegitu rupa hingga menjadi berjenis tingkatan, mulai TK sampai perguruan tinggi. Meski begitu, ada juga madrasah yang mulai didirikan sampai sekarang hanya memiliki kelas tingkat ibtdaiyah saja.

Dari lembaga-lembaga pendidikan NU-Ma'arif yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, hanya di LP Ma'arif Jawa Timur, yang membawahi lebih dari 4000 buah MI, 190 SD, 470 MTs, 325 SMP, 280 MA, 250 SMA, 15 SMEA, 4 STM, dan 15 buah Perguruan Tinggi, yang dapat dikatakan berhasil dalam membina dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga itu untuk mencapai suatu prestasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan misalnya 250 SMA, yang statusnya disamakan ada 7 buah, 80 % dari 250 buah SMA itu statusnya telah diakui. Selain itu, terdapat beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang cukup terkenal, seperti UNISMA, UNSURI, UNDAR Jombang, IKAHA Jombang, Universitas Tri Bakti Kediri, dan sebagainya (Nasikh Ridwan, 1993).

Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat sendiri, madrasah dan sekolah NU memiliki karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat; diakui sebagai milik masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Guru-guru madrasah adalah juga guru-guru masyarakat yang tingkah lakunya dinilai, diawasi, dan ditiru oleh masyarakat. Madrasah NU juga merupakan pusat kegiatan masyarakat pada beberapa bidang tertentu, khususnya pada bidang keagamaan.

Masyarakat mendirikan sebuah madrasah dengan dilandasi oleh mental *al-itimad alannafsi* (percaya pada diri sendiri), tidak menunggu bantuan dari luar. Pada zaman penjajahan, NU tegas-tegas menolak bantuan pemerintah jajahan bagi madrasah dan segala bidang kegiatannya. Sikap mental berdiri di atas kaki sendiri seharusnya dipertahankan dan dikembangkan terus meskipun pada zaman kemerdekaan ini bantuan dari pemerintah nasional tidak ditolak. Sikap ini merupakan modal besar bagi NU, bukan saja dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup madrasah dan sekolah, tetapi juga untuk mempertahankan karakteristik masyarakat, baik dalam melaksanakan kegiatan maupun menetapkan dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan cita-citanya. Di Indonesia terdapat kelembagaan madrasah yang jumlahnya cukup signifikan. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 3.772 (berstatus Negeri 577 dan swasta 3.195) atau 84,7 % swasta. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs.) sebanyak 10.792 (berstatus Negeri 1.168 dan swasta 9.624) atau 89,2 % swasta. Jumlah MI 22.799 (berstatus negeri 1.482 dan swasta 21.317) atau 93,5 % swasta (Ulum & Wahid, 2019).

Upaya desentralisasi madrasah sebetulnya lebih difokuskan untuk madrasah-madrasah negeri tersebut, sementara madrasah swasta sejak awal memang sudah berada di tengah-tengah masyarakat, beroperasi secara mandiri dan otonom. Artinya, secara umum madrasah telah meluncur di rel otonomi pendidikan. Masyarakat madrasah banyak yang menyampaikan keluhannya, terutama dalam menghadapi akses otonomi daerah. Berbeda dengan eksistensi sekolah, di beberapa daerah madrasah memang belum diterima secara bulat oleh daerah. Misalnya dalam hal penyediaan anggaran pendidikan. Pimpinan Pusat LP NU-Ma'arif telah melayangkan surat kepada Departemen Agama untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa desentralisasi madrasah sudah mendesak diterapkan.

NU-Ma'arif harus meningkatkan dan mengembangkan madrasah dan sekolahnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh agama dan keharusan sejarah. Penyediaan tenaga, sarana dan fikiran yang lebih besar adalah mutlak adanya. Akan tetapi, di dalam peningkatan semangat dan kesibukan meningkatkan diri itu, tidak boleh diabaikan pemeliharaan sikap mental *itimad alannafsi*. Dalam berlomba dengan zaman, tidak boleh terjadi erosi (kelongsoran) karakter NU-Ma'arif dengan madrasah dan sekolahnya. Mulai dari pembenahan madrasah dan sekolah inilah kiranya pendidikan yang diselenggarakan NU-Ma'arif dapat diharapkan fungsi dan perannya dalam upaya peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, memiliki kompetensi, memiliki relevansi mutu (bagi pembangunan dan wilayah global) serta berdaya saing (kompetitif). Lebih dari itu, output pendidikan NU-Ma'arif yang bermutu tentu saja akan berpengaruh secara luas pada terciptanya *good governance*, *civil society*, dan unit-unit keluarga yang kuat, sehingga NU, bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Untuk itulah, NU turut berpartisipasi dalam beberapa program pemerintah di bidang pendidikan.

Tujuan Pendidikan NU

Stigma buruk, kumuh, tidak dikelola dengan baik dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh NU-Ma'arif kadang kala masih terjadi, bahkan madrasah dituduh sebagai tempat pelatihan

teroris. Padahal cita-cita NU-Maarif adalah mengelola madrasah sebagai pusat keunggulan; misalnya, dalam hal mental-spiritual atau perilaku yang baik. Madrasah juga diharapkan dapat berperan dalam memobilisasi gerakan publik, menghasilkan lulusan yang bersikap toleran, dan lain sejenisnya, inilah harapan NU-Ma'arif untuk menjadikan madrasah sebagai sekolah unggulan. Menurut Abd Haris, yang menjadi masalah klasik di dalam lembaga pendidikan NU-Ma'arif adalah persoalan manajemen, koordinasi, pengembangan kreativitas, dan penciptaan inovasi. NU itu miskin inovasi, maka yang dapat dilakukan NU-Maarif adalah melakukan pengembangan SDM di kalangan NU-Maarif sendiri; baik pengurusnya, kepala sekolahnya, guru-gurunya; misal, disekolahkan oleh NU (Ulum & Wahid, 2019).

Sementara itu hal yang belum dilakukan adalah dukungan dari NU sendiri, yang sebetulnya punya peran penting. Terutama dari para da'i di NU. Kenapa da'i. Oleh karena NU itu tradisional, selama ini mereka memahami bahwa mencari pahala itu hanya melalui pengajian dari para da'i. Kesadaran mereka untuk mengais pahala besar melalui proses pendidikan kurang begitu tampak. Ini sebenarnya peran da'i untuk memberikan kesadaran bahwa mencari pahala lewat pendidikan itu juga dianjurkan (KH. Achmad Siddiq, 2005). Masyarakat NU kalau mau mengerluarkan uang untuk kiai itu luar biasa, tetapi jika mengeluarkan uang untuk laboratorium, perpustakaan, mereka kurang tergugah. Ini antara lain menjadi tugas kiai untuk memberikan kesadaran bahwa jariah (amal yang mengalir) lewat pendidikan itu juga amat besar pahalanya. Ini penting karena selama ini dana umat sering tersalur hanya untuk kepentingan misalnya- masjid, padahal masjidnya sudah banyak yang bagus. Jadi untuk lebih memproporsionalkan amal sebenarnya perlu disebarkan ke bidang-bidang yang selama ini belum banyak tergarap.

Terhadap persoalan keilmuan, pendidikan NU-Ma'arif yang memang lebih menekankan keilmuan keagamaan, sering terjebak dalam persoalan dikotomisme keilmuan (agama dan umum); seolah yang lebih penting adalah keilmuan agama dan keilmuan umum dianggap tidak penting, karena tidak dipertanyakan di hari Khisab (perhitungan) nanti. Menurut Aceng Abdul Azis, Jika ditelusuri ke belakang, paradigma, dikotomi Pendidikan, semakin menonjol karena terlembaganya format struktural birokrasi Pendidikan Nasional (Diknas) dan Pendidikan Agama (Depag), ini akhirnya berpengaruh pada terpeliharanya persepsi dan tradisi pendidikan yang dikotomis agama-umum di Indonesia (Aceng Abdul Azis DY, 2003). Rupanya fakta itu pula yang berkontribusi besar pada terciptanya setting pendidikan NU hingga sekarang yang berkonsentrasi pada pendidikan pesantren, diniyyah, majlis ta'îm, madrasah dan perguruan tinggi agama, seolah-olah mempertegas jati diri NU sebagai *jama'iyah diniyyah*. Padahal dalam tinjauan historis, NU telah mengkritik keras terhadap paham dualisme ilmu tersebut. KH. Wachid Hasyim (Almarhum), misalnya, menyatakan bahwa pendidikan Indonesia yang dikotomik merupakan warisan penjajah Belanda dan sangat berbahaya bagi umat Islam.

Pendidikan yang dikotomik hanya akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tak bermoral dan ulama-ulama yang tak mengenal zamannya. Untuk itulah, secara gigih Wahid Hasyim menyarankan agar setiap lembaga pendidikan mempunyai strategik planning yang mencakup tiga hal: (1) Menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya, (2) Menggambarkan cara mencapai tujuan itu, serta (3) Memberikan keyakinan dan cara, bahwa tujuan yang disusun tersebut dapat tercapai dengan sempurna (Alfiyah, 2015). Walaupun secara organisatoris dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah lebih maju daripada NU, karena memang berdirinya Muhammadiyah (1912) lebih dulu daripada NU (1926); namun secara personal (kualitas SDM) NU tidak ketinggalan bahkan lebih progresif. Hal ini bisa dilihat dari figur-figur semisal Wahid Hasyim, Gus Dur, Ulul Abshar Abdallah, dan lain sebagainya. Berdirinya NU yang lebih kemudian daripada Muhammadiyah bukan berarti NU bersikap reaktif terhadap Muhammadiyah, namun memang berdirinya NU saat itu merupakan kebutuhan yang diharapkan mewartakan kepentingan ulama dan umat manusia secara besar. Kepentingan NU saat itu adalah koordinasi umat Islam dalam rangka menghalau serangan kelompok penyebar bid'ah dan perjuangan mengusir penjajah.

Patron kiai (ulama) yang berlebihan di kalangan struktural NU juga menjadi persoalan tersendiri. Kebijakan-kebijakan organisasi yang sudah tertata rapi dan disepakati secara bersama, terkadang luntur dan gugur hanya karena somasi kiai yang bersikap emosional. Pada pengurusan NU, seorang kiai tingkat ranting bisa mengusul pengurus wilayah. Jadi perlu juga membangun kesadaran di kalangan para kiai NU. Hal-hal inilah yang menuntut penyelesaian segera dari stakeholders (para pelaku) di lingkungan NU-Ma'arif sendiri. Kemungkinan solusi problem dan peningkatan kualitas pendidikan NU problematika dan kelemahan LP NU-

Ma'arif tentu sudah disadari oleh para stakeholders LP NU-Ma'arif sendiri, sehingga berbagai ide dan inovasi coba ditawarkan dalam rangka penyelesaian berbagai problem yang ada. Jawa Timur pernah menyelenggarakan pelatihan kepala sekolah, pelatihan guru dan sebagainya, dalam rangka mencapai profesionalitas. Pelatihan guru juga bermacam-macam, ada yang bentuknya pelatihan guru Aswaja, pelatihan guru bidang studi, pelatihan guru bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ada yang bentuknya sertifikasi guru, sebab banyak guru di lingkungan NU-Ma'arif yang belum punya ijazah guru. Pernah NU-Ma'arif Jawa Timur bekerjasama dengan UNESA untuk melakukan pelatihan sertifikasi guru untuk guru-guru Ma'arif, dan ditemukan di Gresik saja, ada sekitar 9 angkatan (per angkatan 50 guru) yang tidak punya ijazah keguruan. Jadi di Gresik waktu itu ada 450 guru yang tidak pernah sekolah di bidang keguruan.

SIMPULAN

Keberadaan pendidikan NU merupakan sejarah panjang yang tidak akan pernah tuntas sampai sekarang bahkan masa yang akan datang. Dalam artian, keberadaannya tetap harus dipertahankan dengan upaya penyelesaian berbagai masalah yang melingkupi dan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Salah satu hal yang mungkin perlu ditekankan untuk dilakukan oleh NU adalah upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) kader-kadernya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, merekomendasi sekolah, dan sejenisnya melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimilikinya. Setelah itu memanfaatkannya untuk pengembangan lembaga terutama pendidikan NU ke depan. Tentu hal ini dapat dilakukan karena eksistensi pendidikan NU memiliki dua ciri keunggulan; (1) *Aliyâh itimad alannafsi* (berdikari), (2) *Fil Ijtimaiyah* (memasyarakat) yang berarti dari masyarakat dan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris. (2006). *Filsafat Pendidikan NU: Studi atas Konsep Pendidikan Ma'arif Jawa Timur*. Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel, 37.
- Aceng Abdul Azis DY. (2003). *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan, dalam LP. Ma'arif NU Pusat, NU: dari Ulama untuk Indonesia Jakarta*.
- Ainun Mardhiah & Sulaiman W. (2022). PEMBENTUKAN PERILAKU NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BAGI ANAK SEJAK DINI MELALUI KELUARGA YANG BERKUALITAS. *Serambi Tarbawi*, 10(Nonor: 2), 153–164. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/tarbawi/article/view/4766>
- Alfiyah, H. Y. (2015). TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA. *At-Turâs*, 2(Nomor: 2), 205–219.
- Azis DY & Aceng Abdul. (2003). *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan, dalam LP. Maar Tarif NU Pusat, NU: dari Ulama untuk Indonesia. Jakarta, 20 Desember*.
- Bruinessen & Martin van. (1994). *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 27*.
- Imam Chuseno. (2003). *Gerakan Dakwah dan Pendidikan Jamâtiyah NU di Pulau Jawa (Periode Muktamar NU ke 27 Situbondo 1984 - Muktamar 28 Krapyak Yogyakarta 1990. Yogyakarta: Disertasi UIN Suska, 67*.
- KH. Achmad Siddiq. (2005). *Khittah Nahdliyyah, cet. 3. Surabaya: Khalista-LTNU*.
- Mastuhu. (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 56*.
- Nasikh Ridwan. (1993). *Pendidikan di NU Antara Cita dan Fakta. Bangkit, No. 5 Juli-Agustus, 45*.
- Ratih Kusuma Ningtias. (2018). Eksistensi Nahdlatul Ulama Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Masyarakat Pesisir: Studi Di Pesisir Pantai Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Darajat: Jurnal PAI*, 1(Nomor: 2), 1–16. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/322/257>
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3517>
- W., S. (2022). Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3953–3966. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2418>
- W, S. (2022a). Konsep Moderasi Beragama dalam Pandangan Pendidikan Hamka. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 2704–2714. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2593>
- W, S. (2022b). Pengembangan Kurikulum: (Sebagai Peran Guru Profesional). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(3), 3752–3760. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2645>
- Zainuddin, Z., & Sulaiman W., S. W. (2022). Pola Dasar Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Anak Sholeh Perspektif Pendidikan Islam. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.35473/ijec.v4i2.1780>

Zainuddin, Z., W., S., Musriparto, M., & Nur, M. (2022). Solusi Pembentukan Perilaku Nilai Moral Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Islam. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4335–4346. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2606>